

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agustino, Leo, 2016, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*, Alfabeta, Bandung.
- Chaidir, Anwarm 1997, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rhineka Cipta, Jakarta
- Chomzah, Ali Achmad, 2004, *Hukum Agraria Pertanahan Indonesia*, Jilid 2, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Hardiyansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya)*, Gava Media, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya. Ed. Revisi. Cet.8*, Djambatan, Jakarta.
- MA, Saifuddin Azwar, 2004, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Moenir, A.S., 2008, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Mujiono, 1992, *Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta.
- M.S, Amir, 2003, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT. Mutiara Sumber Widya Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tjiptono, Fandy, 2006, *Manajemen Jasa*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

### Artikel Jurnal:

- Sri Armadani, "Pensertipikatan Tanah Ulayat (Pusako Tinggi) Minangkabau dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.6: Edisi 1 Januari-Juni 2019.

### **Penelitian:**

- Estungkoro, Hanif, 2019, *Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nadeak, Tongam, 2018, *Implementasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan*, Skripsi, Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.
- Sahprada, Karina Gita, 2018, *Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5357)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 431).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 699)

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan.

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 6).

### **Website:**

Anwar Hidayat, 2017, Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail, diakses dari <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html> diakses pada 23 Oktober 2019.

Anonymous, 2014, Pengembangan Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, <http://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2014/10/es-pening-kualipublik.pdf> diakses pada 11 Februari 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kamusbahasaIndonesia.org/kualitas> diakses pada tanggal 23 Januari 2020.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, diakses dari <https://www.atrbpn.go.id/Tentang-Kami/Struktur-Organisasi-Pejabat/Kantor-Wilayah-Badan-Pertanahan-Nasional> diakses pada 23 Januari 2020.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, “Monitoring Program/Kegiatan APBN”, <https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Inovasi/Layanan-Monitoring-Online> diakses pada 15 Februari 2020

**Literatur lain:**

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, 2019, Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap Bidang Yuridis, Jakarta.